

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA METRO  
TAHUN 2023**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan 1 bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan 2 bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renja-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro mempunyai tugas Pokok *“Membantu Kepala Daerah dalam memyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- f. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
- h. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- i. Pelaksanaan pelayanan KB
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

#### A. Visi dan Misi

Penyusunan Renja tahun 2023 ini didasarkan pada tema pembangunan Kota Metro tahun 2023 : ***“Meningkatkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan”***.

*tema tersebut dapat diartikan:*

1. Masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai masyarakat yang produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sosial, material dan spiritual
2. Daya saing masyarakat didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif, mandiri dan terbuka dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama.
3. Pembangunan yang merata didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah sesuai dengan peruntukan ruang sehingga kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan maksimal.
4. Pembangunan yang berkeadilan didefinisikan sebagai pembangunan yang pro rakyat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan telah disepakati:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan

3. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Pengentasan Kemiskinan, kualitas Perempuan dan anak, prestasi olahraga, kualitas pemuda, pemberdayaan masyarakat, pelestarian kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat, memperkuat moderasi beragama

Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan meliputi : penguatan konektivitas, Pengembangan wilayah, integrasi sistem drainase, persampahan, peningkatan sanitasi masyarakat, peningkatan kualitas gedung perkantoran, penyediaan air bersih

Pengelolaan Pemerintahan yang bermartabat meliputi : Perencanaan yang profesional, Pengelolaan keuangan yang akuntabel, Pelayanan publik yang prima, peningkatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan birokrasi yang transparan, profesional dan berprinsip keadilan, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Peningkatan struktur ekonomi yang produktifitas mandiri dan berdaya saing meliputi : Peningkatan produktivitas sector ekonomi, Peningkatan nilai tambah, peningkatan daya beli masyarakat, ketahanan pangan, tenaga kerja yang berdaya saing.

Dalam upaya menterjemahkan dan melaksanakan amanat sebagaimana disebutkan pada Visi dan Misi serta tema pembangunan Kota Metro Tahun 2023 diatas, disusun Dokumen Perencanaan Tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro, sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang terakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2023.

Sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan, RENJA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 memuat program prioritas yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program prioritas tersebut memiliki dampak dan keterkaitan yang besar terhadap pencapaian sasaran program pembangunan secara keseluruhan, baik dengan skala lokal maupun nasional.

2. Program prioritas tersebut memiliki sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Program prioritas tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas utama pemerintah serta bersifat realistis untuk dilaksanakan.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
21. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
26. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
31. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
46. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

47. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
48. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
53. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15);
54. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
55. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.
56. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang: Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
57. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

**Maksud :**

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro untuk satu tahun anggaran;
- b. Memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan dalam jangka satu tahun depan;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- d. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

**Tujuan :**

- a. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2023;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2023.

**1.4. Sistematika Penulisan**

58. *Outline* Renja Dinas PP PA PP KB Kota Metro Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang: Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penyusunan RENJA, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENJA tahun rencana, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RENJA, dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Daerah, serta sistematika RENJA.

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

## **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

## **Bab III Tujuan dan Sasaran**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

## **Bab IV Program dan Kegiatan**

## **Bab IV Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB KOTA METRO TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPPAPPKB**

Adapun program-program yang menjadi urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro pada tahun 2022 berjumlah 10 program, yaitu :

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RUTIN) :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  
- URUSAN I PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
  1. Program Pengendalian Penduduk

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Secara keseluruhan Rencana Kerja tahun 2023 tingkat pencapaian program rata-rata mencapai 79,50%.

Review hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi anggaran. Berikut table tentang Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro, sebagai berikut :

TABEL REALISASI CAPAIAN KEUANGAN DAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

SKPD :  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA METRO

| N<br>O | URUSAN/<br>BIDANG<br>URUSAN                                                           | PROGRAM /KEGIATAN/<br>SUB KEGIATAN                                                         | ANGGARAN<br>2022(Rp) | REALISASI<br>2022(Rp) | SISA ANGGARAN | Capaian<br><br>(%) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 1      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA (RUTIN) |                                                                                            | 4.397.595.<br>322    | 4.133.003.438         | 264.591.884   | 93,98              |
|        |                                                                                       | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                       | 4.397.595.<br>322    | 4.133.003.438         | 264.591.884   | 93,98              |
|        |                                                                                       | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                  | 32.920.300           | 32.225.950            | 694.350       | 97,89              |
|        |                                                                                       | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                      | 15.168.400           | 15.079.850            | 88.550        | 99,42              |
|        |                                                                                       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                           | 9.931.000            | 9.366.700             | 564.300       | 94,32              |
|        |                                                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                       | 7.820.900            | 7.779.400             | 41.500        | 99,47              |
|        |                                                                                       | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                  | 4.003.105.<br>692    | 3.801.838.733         | 201.266.959   | 94,97              |
|        |                                                                                       | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                       | 3.738.788.<br>992    | 3.539.050.783         | 199.738.209   | 94,66              |
|        |                                                                                       | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                           | 136.500.00<br>0      | 136.500.000           | 0             | 100,00             |
|        |                                                                                       | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                  | 99.662.700           | 99.633.500            | 29.200        | 99,97              |
|        |                                                                                       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                       | 7.789.900            | 7.296.150             | 493.750       | 93,66              |
|        |                                                                                       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Seme<br>steran SKPD | 20.364.100           | 19.358.300            | 1.005.800     | 95,06              |
|        |                                                                                       | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                      | 117.383.20<br>0      | 112.912.380           | 4.470.820     | 96,19              |
|        |                                                                                       | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                  | 2.921.400            | 2.903.000             | 18.400        | 99,37              |
|        |                                                                                       | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                        | 57.539.000           | 53.800.700            | 3.738.300     | 93,50              |

|          |                                                                                |                                                                                                                    |                      |                      |                    |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|          |                                                                                | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 31.416.800           | 31.403.800           | 13.000             | 99,96        |
|          |                                                                                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 8.976.000            | 8.340.000            | 636.000            | 92,91        |
|          |                                                                                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 16.530.000           | 16.464.880           | 65.120             | 99,61        |
|          |                                                                                | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>9.745.000</b>     | <b>0</b>             | <b>9.745.000</b>   | <b>0,00</b>  |
|          |                                                                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 9.745.000            | 0                    | 9.745.000          | 9.745.000,00 |
|          |                                                                                | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>87.967.480</b>    | <b>58.942.377</b>    | <b>29.025.103</b>  | <b>67,00</b> |
|          |                                                                                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.600.000            | 3.600.000            | 0                  | 100,00       |
|          |                                                                                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 84.367.480           | 55.342.377           | 29.025.103         | 65,60        |
|          |                                                                                | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>146.473.650</b>   | <b>127.083.998</b>   | <b>19.389.652</b>  | <b>86,76</b> |
|          |                                                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.372.250           | 33.370.000           | 2.250              | 99,99        |
|          |                                                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 105.081.400          | 85.693.998           | 19.387.402         | 81,55        |
|          |                                                                                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 8.020.000            | 8.020.000            | 0                  | 100,00       |
| <b>2</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |                                                                                                                    | <b>1.957.466.100</b> | <b>1.557.809.792</b> | <b>399.656.308</b> | <b>79,58</b> |
|          |                                                                                | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                   | <b>1.005.569.900</b> | <b>954.167.500</b>   | <b>51.402.400</b>  | <b>94,89</b> |
|          |                                                                                | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                   | <b>18.894.000</b>    | <b>18.058.600</b>    | <b>835.400</b>     | <b>95,58</b> |
|          |                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 18.894.000           | 18.058.600           | 835.400            | 95,58        |
|          |                                                                                | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>            | <b>889.222.300</b>   | <b>839.222.300</b>   | <b>50.000.000</b>  | <b>94,38</b> |

|  |  |                                                                                                                                               |                    |                    |                   |              |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|  |  | <b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                              |                    |                    |                   |              |
|  |  | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                    | 450.000.000        | 450.000.000        | 0                 | 100,00       |
|  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                  | 439.222.300        | 389.222.300        | 50.000.000        | 88,62        |
|  |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>97.453.600</b>  | <b>96.886.600</b>  | <b>567.000</b>    | <b>99,42</b> |
|  |  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 97.453.600         | 96.886.600         | 567.000           | 99,42        |
|  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                         | <b>177.819.000</b> | <b>86.575.900</b>  | <b>91.243.100</b> | <b>48,69</b> |
|  |  | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  | <b>74.979.000</b>  | <b>71.202.000</b>  | <b>3.777.000</b>  | <b>94,96</b> |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 74.979.000         | 71.202.000         | 3.777.000         | 94,96        |
|  |  | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | <b>102.840.000</b> | <b>15.373.900</b>  | <b>87.466.100</b> | <b>14,95</b> |
|  |  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | 5.000.000          | 4.999.900          | 100               | 100,00       |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | 97.840.000         | 10.374.000         | 87.466.000        | 10,60        |
|  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                  | <b>112.899.500</b> | <b>111.516.200</b> | <b>1.383.300</b>  | <b>98,77</b> |
|  |  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <b>107.899.500</b> | <b>106.596.000</b> | <b>1.303.500</b>  | <b>98,79</b> |

|  |  |                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |              |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|  |  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              | 107.899.500        | 106.596.000        | 1.303.500          | 98,79        |
|  |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>5.000.000</b>   | <b>4.920.200</b>   | <b>79.800</b>      | <b>98,40</b> |
|  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | 5.000.000          | 4.920.200          | 79.800             | 98,40        |
|  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                                      | <b>5.000.000</b>   | <b>4.630.200</b>   | <b>369.800</b>     | <b>92,60</b> |
|  |  | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>5.000.000</b>   | <b>4.630.200</b>   | <b>369.800</b>     | <b>92,60</b> |
|  |  | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/KotaD                                                                                                               | 5.000.000          | 4.630.200          | 369.800            | 92,60        |
|  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                     | <b>176.046.800</b> | <b>161.611.792</b> | <b>14.435.008</b>  | <b>91,80</b> |
|  |  | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>137.716.600</b> | <b>125.606.592</b> | <b>12.110.008</b>  | <b>91,21</b> |
|  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                             | 137.716.600        | 125.606.592        | 12.110.008         | 91,21        |
|  |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>38.330.200</b>  | <b>36.005.200</b>  | <b>2.325.000</b>   | <b>93,93</b> |
|  |  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               | 38.330.200         | 36.005.200         | 2.325.000          | 93,93        |
|  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                                     | <b>480.130.900</b> | <b>239.308.200</b> | <b>240.822.700</b> | <b>49,84</b> |

|          |                                                                                |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                                                                                | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            | <b>75.471.000</b>    | <b>74.388.000</b>    | <b>1.083.000</b>     | <b>98,57</b> |
|          |                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 75.471.000           | 74.388.000           | 1.083.000            | 98,57        |
|          |                                                                                | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>302.353.900</b>   | <b>77.933.700</b>    | <b>224.420.200</b>   | <b>25,78</b> |
|          |                                                                                | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | 24.800.000           | 24.799.800           | 200                  | 100,00       |
|          |                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 251.204.000          | 26.869.000           | 224.335.000          | 10,70        |
|          |                                                                                | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 26.349.900           | 26.264.900           | 85.000               | 99,68        |
|          |                                                                                | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>102.306.000</b>   | <b>86.986.500</b>    | <b>15.319.500</b>    | <b>85,03</b> |
|          |                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 102.306.000          | 86.986.500           | 15.319.500           | 85,03        |
| <b>3</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |                                                                                                                                                               | <b>2.744.231.700</b> | <b>1.542.847.823</b> | <b>1.201.383.877</b> | <b>56,22</b> |
|          |                                                                                | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                          | <b>200.576.300</b>   | <b>175.344.150</b>   | <b>25.232.150</b>    | <b>87,42</b> |
|          |                                                                                | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>    | <b>200.576.300</b>   | <b>175.344.150</b>   | <b>25.232.150</b>    | <b>87,42</b> |
|          |                                                                                | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan                                                         | 101.196.300          | 88.109.850           | 13.086.450           | 87,07        |

|  |  |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  | Pembangunan Keluarga<br>(Program KKBPK)                                                                                                                                   |                      |                      |                      |              |
|  |  | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00         |
|  |  | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                          | 75.880.000           | 67.257.000           | 8.623.000            | 88,64        |
|  |  | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal       | 23.500.000           | 19.977.300           | 3.522.700            | 85,01        |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                          | <b>2.462.042.400</b> | <b>1.286.702.323</b> | <b>1.175.340.077</b> | <b>52,26</b> |
|  |  | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                            | <b>119.578.700</b>   | <b>99.257.400</b>    | <b>20.321.300</b>    | <b>83,01</b> |
|  |  | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                        | 24.509.100           | 23.048.900           | 1.460.200            | 94,04        |
|  |  | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi U                  | 70.070.000           | 51.935.700           | 18.134.300           | 74,12        |
|  |  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK                                                                                                              | 24.999.600           | 24.272.800           | 726.800              | 97,09        |
|  |  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                    | <b>2.281.518.900</b> | <b>1.127.719.123</b> | <b>1.153.799.777</b> | <b>49,43</b> |
|  |  | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                          | 363.000.000          | 318.362.000          | 44.638.000           | 87,70        |
|  |  | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1.848.946.500        | 740.384.323          | 1.108.562.177        | 40,04        |
|  |  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)D                                                                                                                    | 69.572.400           | 68.972.800           | 599.600              | 99,14        |
|  |  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>60.944.800</b>    | <b>59.725.800</b>    | <b>1.219.000</b>     | <b>98,00</b> |

|              |  |                                                                                                                                                                        |                           |                      |                      |              |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |  | Dukungan Operasional<br>Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                          | 60.944.800                | 59.725.800           | 1.219.000            | 98,00        |
|              |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN DAN<br/>PENINGKATAN KELUARGA<br/>SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                        | <b>81.613.000</b>         | <b>80.801.350</b>    | <b>811.650</b>       | <b>99,01</b> |
|              |  | <b>Pelaksanaan<br/>Pembangunan Keluarga<br/>melalui Pembinaan<br/>Ketahanan dan<br/>Kesejahteraan Keluarga</b>                                                         | <b>81.613.000</b>         | <b>80.801.350</b>    | <b>811.650</b>       | <b>99,01</b> |
|              |  | Orientasi/Pelatihan Teknis<br>Pelaksana/Kader<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>(BKB, BKR, BKL, PPPKS,<br>PIK-R dan Pemberdayaan<br>Ekonomi Keluarga/UPPKS | 68.829.000                | 68.829.000           | 0                    | 100,00       |
|              |  | Promosi dan Sosialisasi<br>Kelompok Kegiatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>(BKB, BKR, BKL, PPPKS,<br>PIK-R dan Pemberdayaan<br>Ekonomi Keluarga/UPPKS  | 6.104.400                 | 5.956.700            | 147.700              | 97,58        |
|              |  | Promosi dan Sosialisasi<br>Kelompok Kegiatan<br>Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>(Menjadi Orangtua Hebat,<br>Generasi Berencana)                             | 6.679.600                 | 6.015.650            | 663.950              | 90,06        |
| <b>TOTAL</b> |  |                                                                                                                                                                        | <b>9.099.293.<br/>122</b> | <b>7.233.661.053</b> | <b>1.865.632.069</b> | <b>79,50</b> |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### 2.2.1. Faktor SDM

DPPPAPPKB Kota Metro merupakan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Serta Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro mempunyai tugas Pokok *“Membantu Kepala Daerah dalam memyenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan”*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- f. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
- h. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- i. Pelaksanaan pelayanan KB
- j. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari DPPPAPPKB Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh Sekretaris yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas bidang serta ketatausahaan dan 4 (empat) Kepala Bidang yang memimpin bidang teknis. Bidang teknis yang ada di DPPPAPPKB Kota Metro adalah Bidang Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, serta Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan struktur organisasi Bagian Sekretariat DPPPAPPKB membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB, dan Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB, dan Sub Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan, dan Sub Bidang Sub Bidang Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dan Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang Yaitu : Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Sub Bidang Kualitas Keluarga Data dan Gender. Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak, Sub Bidang Perlindungan Anak dan Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi Anak, serta ditambah dengan UPT. PPPA.

Jumlah pegawai DPPPAPPKB kota Metro pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 52 orang, terdiri dari 43 PNS dan 9 orang tenaga honorer. Berikut adalah rincian pegawai DPPPAPPKB Kota Metro menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan tingkat pendidikan.

**Tabel**  
**Jumlah Pegawai DPPPAPPKB Kota Metro sampai dengan 31 Desember 2021**

**A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Uraian                                     | Tahun 2022 |
|----|--------------------------------------------|------------|
| 1  | Jumlah PNS pendidikan terakhir SD          | 0          |
| 2  | Jumlah PNS pendidikan terakhir SMP         | 0          |
| 3  | Jumlah PNS pendidikan terakhir SLTA        | 4 orang    |
| 4  | Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma I   | 0          |
| 5  | Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma II  | 0          |
| 6  | Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma III | 2 orang    |
| 7  | Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma IV  | 0          |
| 8  | Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata I    | 28 orang   |
| 9  | Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata II   | 6 orang    |

|    |                                           |                 |
|----|-------------------------------------------|-----------------|
| 10 | Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata III | 0               |
|    |                                           |                 |
|    | <b>Jumlah seluruh PNS</b>                 | <b>43 orang</b> |

**B. Menurut Golongan**

| No | Uraian                    | tahun 2022      |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1  | Jumlah PNS Golongan I     | 0               |
| 2  | Jumlah PNS Golongan II    | 3 orang         |
| 3  | Jumlah PNS Golongan III   | 33 orang        |
| 4  | Jumlah PNS Golongan IV    | 7 orang         |
| 5  | Pejabat Fungsional        | 11 orang        |
|    | <b>Jumlah seluruh PNS</b> | <b>43 orang</b> |

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPAPPKB**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya pola pikir di masyarakat yang kurang tepat mengenai keluarga berencana.
2. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak berwenang
3. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan.
4. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin) dan faktor kesiapan SDM.

5. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mengusung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak.
6. Pendidikan politik bagi perempuan untuk mensukseskan Indonesia sebagai salah satu Negara dari 10 negara Champion
7. Rendahnya keterampilan pencari kerja (pencegahan KDRT : pekerja perempuan bekerja sama dengan lembaga pelatihan keterampilan)
8. Masih kurangnya kapasitas SDM DPPPAPPKB Kota Metro.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. DPPPAPPKB Kota Metro menjaring usulan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan yang diusulkan pada Musrenbangkel dan Musrenbang kec.

- **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W-KSS & GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**  
Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan.

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PP PA PP KB Tahun 2023

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan-nya dan diturunkan untuk setiap tujuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro termasuk dalam bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Index Pembangunan Manusia (IPM), Index Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk Tumbuh Seimbang. Pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup anak dan perempuan.

Dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR 2.1 point dan NRR 1 point, maka kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan adalah :

1. Revitalisasi Program KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dengan strategi pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana serta Promosi dan Penggerakkan Masyarakat.
2. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan.
3. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial, dengan strategi penyediaan analisis data kependudukan yang bersumber pada sensus

penduduk dan survei kependudukan serta peningkatan kualitas data dan informasi manajemen pembangunan kependudukan dan keluarga berencana berbasis teknologi informasi.

Sementara arah kebijakan dan fokus pembangunan Kota Metro Tahun 2023, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada prioritas pembangunan pertama “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing” yang diwujudkan pada sektor pendidikan kesehatan dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur, profesi agama dan suku bangsa. Berdaya saing artinya memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan dalam regional Provinsi Lampung, Nasional maupun Internasional.

### **3.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis tahun 2016-2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro dan mengacu pada Tema Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021, maka dirumuskan tujuan Rencana Kerja SKPD tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana.
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak
4. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak

### **3.2 Sasaran**

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. % ARG di Kota Metro

2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak di Kota Metro

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Predikat Kota Layak Anak

3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. % Pendampingan kasus Kekerasan Perempuan dan anak

4. Meningkatnya partisipasi keluarga berencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)
- b. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Method/mCPR)
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
- d. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) perempuan usia 15-19 tahun.
- e. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Cakupan PUS Anggota UPPKA yang ber KB
- b. Jumlah Kelompok Tribina

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program-program yang menjadi urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro pada tahun 2023 berjumlah 10 program, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 3. Program Perlindungan Perempuan
- 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 7. Program Perlindungan Khusus Anak
- 8. Program Pengendalian Penduduk
- 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sedangkan jumlah kegiatan yang akan rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 5 kegiatan rutin, 5 kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan 12 kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| KODE |   |   |    |    | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN (Kemendagri 050-3708 Tahun 2020) | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN                                                     | SASARAN                             | 2023                         |                  |
|------|---|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
|      |   |   |    |    |                                                                                                          |                                                                                           |                                     | TARGET<br>CAPAIAN<br>KINERJA | PAGU<br>ANGGARAN |
| 1    |   |   |    |    | 2                                                                                                        | 3                                                                                         | 4                                   | 5                            | 6                |
| 2    |   |   |    |    |                                                                                                          |                                                                                           |                                     |                              | 8.061.763.030    |
| 2    | 0 |   |    |    | URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK                |                                                                                           |                                     |                              |                  |
|      |   |   |    |    |                                                                                                          |                                                                                           |                                     |                              | 5.165.740.230    |
| 2    | 0 | 0 |    |    | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                               | Cakupan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perangkat daerah                                     | Dinas<br>PPPAPP<br>KB Kota<br>Metro | 100%                         | 3.714.836.080    |
|      |   |   |    |    |                                                                                                          |                                                                                           |                                     |                              |                  |
| 2    | 0 | 0 | 2. | 01 | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                | Persentase<br>dokumen<br>perencanaan dan<br>evaluasi kinerja yang<br>tersusun tepat waktu | Dinas<br>PPPAPPK<br>B Kota<br>Metro | 100%                         | 27.301.900       |

|   |   |   |    |   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                                  |                      |
|---|---|---|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 3 dokumen ( Renja, PK-RKT, Rencana Aksi Kinerja) | 10.168.400           |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 4 Dokumen                                        | 6.866.100            |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 2 Dokumen                                        | 6.669.800            |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 3 Dokumen (LPPD, LKPD, dan LAKIP)                | 3.597.600            |
| 2 | 0 | 0 | 2. |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | Persentase dokumen administrasi keuangan yng tersusun tepat waktu                                                                                                      | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 90%                                              | <b>3.307.678.768</b> |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 48 Orang/bulan                                   | 3.043.008.468        |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 Dokumen                                        | 134.100.000          |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 Dokumen                                        | 109.462.700          |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 laporan                                        | 15.743.500           |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 38 laporan                                       | 5.364.100            |
|   |   |   |    |   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                                  |                      |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                         |                                                                                                        |                            |             |                    |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 2 | 08 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                               | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran                                                      | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 90%         | <b>74.888.300</b>  |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 8 Paket     | 2.918.200          |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kantor                                              | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 66 Paket    | 31.835.900         |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 12 Paket    | 23.430.200         |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 Dokumen   | 4.638.000          |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 19 Laporan  | 12.066.000         |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                               |                                                                                                        | Dinas PPPAPP KB Kota Metro |             | <b>61.377.112</b>  |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 600 Laporan | 3.600.000          |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 4 Laporan   | 57.777.112         |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | Persentase BMD yang dilakukan pemeliharaan                                                             | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 90%         | <b>243.590.000</b> |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 28 Unit     | 75.340.000         |

|   |   |   |    |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                            |                     |                    |
|---|---|---|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 27 Unit             | 166.950.000        |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 27 unit             | 1.300.000          |
|   |   |   |    |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                            |                     |                    |
| 2 | 0 | 0 |    |   | <b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>                                                                  | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD                                                                                                 | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 0,01                | <b>758.329.350</b> |
| 2 | 0 | 0 | 2. |   | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Persentase perempuan dalam jabatan dan anggaran responsif gender                                                                          | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 47%                 | 5.000.000          |
| 3 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota               | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen           | 5.000.000          |
| 2 | 0 | 0 | 2. |   | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | Persentase perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan politik (Organisasi Perempuan Kota Metro)                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 organisasi wanita | <b>525.000.000</b> |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi                                        | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 Dokumen           | 275.000.000        |
|   |   |   |    |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | Dinas PPPAPP KB Kota Metro |                     |                    |

|   |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                            |                     |                    |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 02 | Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik,hukum,sosial dan ekonomi  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 organisasi        | 250.000.000        |
|   |    |    |      |    |                                                                                                             | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi (DWP,PKK,IKAD)                                                     | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 70 peserta          | 250.000.000        |
|   |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 35 orang            |                    |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 |    | <b>Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</b> | Jumlah organisasi wanita yang berpartisipasi dalam layanan pemberdayaan perempuan                                                                                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 organisasi wanita | <b>228.329.350</b> |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                        | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 100 Orang           | 152.875.750        |
|   |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                            |                     |                    |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 2 Dokumen           | 75.453.600         |
|   |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                            |                     |                    |
|   |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                            |                     |                    |
| 2 | 08 | 03 |      |    | <b>Program Perlindungan Perempuan</b>                                                                       | % Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan kompresif ( Perempuan di Kota Metro )                                                                                                | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 100%                | <b>148.200.000</b> |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 |    | Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota                                       | % Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan kompresif ( Perempuan di Kota Metro )                                                                                                | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 100%                | 54.850.000         |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                   |             |            |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota    | umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 1 Dokumen   | 54.850.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 |    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>       | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                   | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 5 orang     | 93.350.000 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                   | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 5 orang     | 5.000.000  |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO di tingkat kabupaten/kota yang mendapat layanan                                                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 20 korban   | 88.350.000 |
| 2 | 08 | 04 |      |    | <b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>                                                                                          | <b>Jumlah kelompok perempuan P3KSS di Kota Metro ( Kelompok Perempuan )</b>                                                                                   | <b>Dinas PPPAPP KB Kota Metro</b> | 10 kelompok | 7.500.000  |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 |    | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Keluarga berkualitas di Kota Metro                                                                                                                     | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 1 kegiatan  | 7.500.000  |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 1 Dokumen   | 7.500.000  |
| 2 | 08 | 05 |      |    | <b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>                                                                                | <b>Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro</b>                                                                            | <b>Dinas PPPAPP KB Kota Metro</b> | 32          | 20.000.000 |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 |    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Pengolahan dan pencatatan data gender dan anak                                                                                                                | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 2 Dokumen   | 20.000.000 |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                            |               |                    |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten kota                                                                                                  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                           | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 2 Dokumen     | 20.000.000         |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                            |               |                    |
| 2 | 08 | 06 |      |    | <b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>                                                                                                                       | Persentase tingkat perkawinan anak di Kota Metro ( OPD, Organisasi Masyarakat, institusi )                                                                                                                 | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 15%           | <b>166.974.800</b> |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                               | Capaian predikat Kota Layak Anak                                                                                                                                                                           |                            | madya         | <b>124.691.600</b> |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 |    | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                     | Predikat dalam evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak                                                                                                                                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | Madya         | 124.691.600        |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 10 Organisasi | 124.691.600        |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 |    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                          | Jumlah kelurahan ( Lurah, Kader BKB, BKR)                                                                                                                                                                  | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 22 Kelurahan  | <b>42.283.200</b>  |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen     | 42.283.200         |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                            |               |                    |
| 2 | 08 | 07 |      |    | <b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>                                                                                                                       | Persentase AMPK yang mendapat layanan kompresif ( Anak-anak se kota Metro)                                                                                                                                 | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 100%          | <b>349.900.000</b> |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 |    | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            | Jumlah siswa dan Masyarakat yang diberikan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak (Siswa sekolah dan Masyarakat )                                                                          | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 50 peserta    | <b>70.350.000</b>  |

|   |   |   |    |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                            |                    |                    |
|---|---|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 3 Perangkat Daerah | 15.500.000         |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen          | 54.850.000         |
| 2 | 0 | 0 | 2. |   | <b>Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</b>             | Tersedianya Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ( Anak Korban Kekerasan )                                                                                        | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 UPTD PPA         | <b>204.954.000</b> |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 Orang            | 24.800.000         |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah anak korban kekerasan dan TPPO di tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan                                                                                              | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 30 korban          | 166.154.000        |
| 2 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen          | 14.000.000         |
| 2 | 0 | 0 | 2. |   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>       | Tersedianya personil di UPTD PPA dan Kader Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                         | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 60 orang           | <b>74.596.000</b>  |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                            |           |               |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen | 74.596.000    |
| 2 | 14 |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                                                                | Presentase TFR, ASFR,mCPR, Unmeet Need                                                                                                                                         | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 2,33      | 2.896.022.800 |
| 2 | 14 | 02 |      |    | <b>Program Pengendalian Penduduk</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                            |           | 159.576.300   |
|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                               | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)                                                                                      |                            | 21/1000   |               |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 |    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>    | Jumlah dokumen dan data informasi kependudukan (SIGA)                                                                                                                          | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 dokumen | 159.576.300   |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 01 | Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota terhadap Kependudukan,Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)               | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen | 105.196.300   |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 03 | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                              | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                                             | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Dokumen | 38.880.000    |

|   |        |        |          |        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                            |                     |               |
|---|--------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 2 | 1<br>4 | 0<br>2 | 2.<br>01 | 0<br>9 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5 Satuan Pendidikan | 15.500.000    |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 |          |        | <b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>                                                                                                         | Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49 ( Keluarga se Kota Metro )                                                                                                                | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 72                  | 2.710.628.500 |
|   |        |        |          |        |                                                                                                                                                          | Jumlah cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 12,1                |               |
|   |        |        |          |        |                                                                                                                                                          | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                                       |                            | 29,75               |               |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>01 |        | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                           | Jumlah angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR), PUS Kota Metro dan remaja umur 15-19 tahun                                                                                                             | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 21/100<br>0         | 109.209.100   |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>01 | 0<br>2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                       | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1<br>Dokumen        | 24.509.100    |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>01 | 0<br>5 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK                                   | Jumlah Balai Penyuluhan KB                                                                                                                                                                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 5<br>kecamatan      | 60.700.000    |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>01 | 0<br>7 | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1<br>Laporan        | 24.000.000    |

|   |        |        |          |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |            |                      |
|---|--------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>02 |        | <b>Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB9PKB/PLKB)</b>                                                                                                     | <b>Jumlah PLKB Kota Metro ( PKB/PLKB)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Dinas PPPAPP KB Kota Metro</b> | 22 orang   | <b>2.562.473.900</b> |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>02 | 0<br>3 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 1 Laporan  | 2.532.474.000        |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>02 | 0<br>4 | Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)                                                                                                                     | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                    | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 25 orang   | 29.999.900           |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>03 |        | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | Presentase pemakaian kontrasepsi (CPR) dan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) PUS Kota Metro                                                                                                                                                        | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 72%        | <b>38.945.500</b>    |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>3 | 2.<br>03 | 1<br>1 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                                | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                                                                                                            | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 1 Laporan  | 38.945.500           |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>4 |          |        | <b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>                                                                                                       | Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (BKB, BKR, PIK R )                                                                                                                       | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 0,88       | <b>25.818.000</b>    |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>4 | 2.<br>01 |        | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga                                                                                   | Jumlah kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB (Kelompok BKB,BKL,BKR,PIK R, UPPKS Kota Metro)                                                                                                              | Dinas PPPAPP KB Kota Metro        | 5 kelompok | 13.034.000           |

|   |        |        |          |        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                            |           |            |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 2 | 1<br>4 | 0<br>4 | 2.<br>01 | 0<br>4 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                             | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                     | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 130 Orang | 13.034.000 |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>4 | 2.<br>02 |        | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kelompok Kegiatan yang mendukung pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Kelompok BKB,BKR,PIK R, Kota Metro)                                                                           | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 150 orang | 12.784.000 |
| 2 | 1<br>4 | 0<br>4 | 2.<br>02 | 0<br>8 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Dinas PPPAPP KB Kota Metro | 1 Laporan | 12.784.000 |

Perubahan rencana kegiatan dimungkinkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, visi dan misi kepala daerah Kota Metro, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tetap mengacu pada produk-produk hukum terbaru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, propinsi maupun pusat. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA METRO

Kepala,



**WAHYUNINGSIH, SKM.,M.Kes**  
Pembina Tk.I

NIP. 196703301990032003